



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558 TAHUN 2003
TENTANG
PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan peneraian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta di sekitarnya,
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : 445/M.PAN/12/2003 Tanggal 29 Desember 2003

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH.**

- Pertama : Menegerikan 250 madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 89 buah;
 2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, 92 buah;
 3. Madrasah Aliyah Negeri, 69 buah.
- Kedua : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut :
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Sekolah Dasar yang bercirikan khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
 2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 tahun.
 3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi anak didik;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua/wali anak didik;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium.
 4. Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Petugas Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
 5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.

6. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ketiga

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagai berikut:

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan lanjutan tingkat Pertama yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat;
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Menabina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di

laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.

8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Keempat

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Menengah Umum yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Bidang lain;
2. Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orangtua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

- Alma :** Tujuan kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai berikut:
1. Kepala Madrasah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Madrasah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan peraturan yang berlaku;
 3. Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.
- Keenara :** Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian madrasah swasta seperti tersebut pada lampiran I dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Kesudah :** Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Negeri menjadi 3477 buah dengan rincian sebagai berikut:
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1571 buah,
 2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1260 buah,
 3. Madrasah Aliyah Negeri 646 buah.
- Kedelapan :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003

MENTERI AGAMA ISLAM

SAID AGIL HUSIN AL MINAWAR

NOMOR TANGGAL
MENGESEHAHKAN SALINAN/FOTO COPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
AN KEPALA
KEPALA SUB. BAK. USAHA
JEN. KAB. TULANG BAWANG BARAT

SPRIZON 3.19.MH
NIP. 19721-1-1-0031001

NAMA PROPINSI/DI	NO. URUT	NO. MAD	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	ALAMAT	
2	3	4	5	6	7	
0 DKI Jakarta	27	2	Madrasah Aliyah Negeri Kibang Budi Jaya	Madrasah Aliyah Swasta Amanah Kibang Budi Jaya	Ds. Kibang Budi Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang	K
	28	3	Madrasah Aliyah Negeri Mulya Kencana	Madrasah Aliyah Swasta Miftakurrahman	Ds. Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah	K
	29	1	Madrasah Aliyah Negeri 12 Jakarta Barat	Madrasah Aliyah Swasta Filial 10 Joglo	Jl. Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat Ds. Joglo	K
	30	2	Madrasah Aliyah Negeri 13 Lenteng Agung	Madrasah Aliyah KJ Srengseng sawah	Jl. Syukur Kec. Lenteng Agung	K
	31	3	Madrasah Aliyah Negeri 14 Kampung Dulu	Madrasah Aliyah 6 Kampung Dukuh	Jl. Pekayon Rt 03/04 Pasar Rebo Jakarta Timur	K
1 Jawa Barat	32	1	Madrasah Aliyah Negeri Sukajadi	Madrasah Aliyah Swasta Al-Huda Sukajadi	Ds. Sukajadi Kec. Pamulihan Kab. Ciamis	
		2	Madrasah Aliyah Negeri Cabang Bungin	Madrasah Aliyah Swasta Filial Cabang Bungin	Komplek Tata Kota Ds. Cabang Bungin Kab. Bekasi	
		3	Madrasah Aliyah Negeri Luragung	Madrasah Aliyah Swasta Miftahul Jannah	Jl. Raya Luragung Kab. Ngunting	
		4	Madrasah Aliyah Negeri Salopa	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Huda	Talagang Asli Ds. Mendalawangi Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya	
		5	Madrasah Aliyah Negeri Gegempalan	Madrasah Aliyah Swasta Gegempalan	Ds. Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis	
12 Banten	37	6	Madrasah Aliyah Negeri Rancah	Madrasah Aliyah Swasta Hergarmanah	Jl. Rumah Sakit No. 02 Kel. Situ Mandala Kec. Rancah	
	38	1	Madrasah Aliyah Negeri Cibaliung	Madrasah Aliyah Swasta YSAB	Jl. Raya Sukajadi Cibaliung Kab. Pandeglang	
13 Jawa Tengah	39	1	Madrasah Aliyah Negeri Sawit	Madrasah Aliyah Swasta Sawit Boyolali	Jenengan, Sawit, Boyolali	
	40	2	Madrasah Aliyah Negeri Karanggede	Madrasah Aliyah Swasta Filial Karanggede	Ds. Pengkol Kec. Karanggede Kab. Boyolali	

NOMOR TANGGAL
 MENSAHKAN SALINAN FOTO COPY
 SESUAI DENGAN ASLINYA
 AD KEPALA
 KEPALA SUB BAG TATA USAHA
 KEMENAG KAB. TULANG BAWANG
 EFRIZON S. AG. MH
 NIP. 19720222199903100



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 363 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 17 (Tujuh Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 24 (Dua Puluh Empat) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 49 (Empat Puluh Sembilan) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

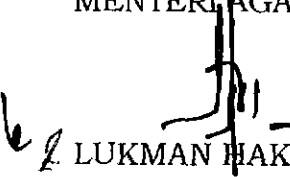
KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ~~369~~ TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 17 (TUJUH BELAS)
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Lampung	MAN 1 (Model) Tanjung Karang	MAN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MAN 2 Tanjung Karang	MAN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MAN 2 Metro	MAN 1 Metro
4	Lampung	MAN Kalianda	MAN 1 Lampung Selatan
5	Lampung	MAN Poncowati	MAN 1 Lampung Tengah
6	Lampung	MAN Kotabumi	MAN 1 Lampung Utara
7	Lampung	MAN Padangratu	MAN 2 Lampung Utara
8	Lampung	MAN Krui	MAN 1 Pesisir Barat
9	Lampung	MAN Liwa	MAN 1 Lampung Barat
10	Lampung	MAN Kotaagung	MAN 1 Tanggamus
11	Lampung	MAN 1 Metro	MAN 1 Lampung Timur
12	Lampung	MAN Banjarnegara	MAN 1 Way Kanan
13	Lampung	MAN Kedondong	MAN 1 Pesawaran
14	Lampung	MAN Pringsewu	MAN 1 Pringsewu
15	Lampung	MAN Mulyakencana	MAN 1 Tulang Bawang Barat
16	Lampung	MAN Kibang Budi Jaya	MAN 2 Tulang Bawang Barat
17	Lampung	MAN Simpang Pematang	MAN 1 Mesuji

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 365 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 24 (DUA PULUH EMPAT)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

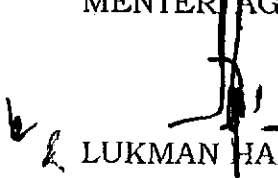
NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Lampung	MTsN 1 Tanjungkarang	MTsN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MTsN 2 Tanjungkarang	MTsN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MTsN Kalianda	MTsN 1 Lampung Selatan
4	Lampung	MTsN Palas	MTsN 2 Lampung Selatan
5	Lampung	MTsN Sidoharjo	MTsN 3 Lampung Selatan
6	Lampung	MTsN Banjarsari	MTsN 4 Lampung Selatan
7	Lampung	MTsN Poncowati	MTsN 1 Lampung Tengah
8	Lampung	MTsN Bandar Surabaya	MTsN 2 Lampung Tengah
9	Lampung	MTsn 1 Kotabumi	MTsN 1 Lampung Tengah
10	Lampung	MTsn 2 Kotabumi	MTsN 2 Lampung Tengah
11	Lampung	MTsN Padang Ratu	MTsN 3 Lampung Tengah
12	Lampung	MTsN Liwa	MTsN 1 Lampung Barat
13	Lampung	MTsN Menggala	MTsN Tulang Bawang
14	Lampung	MTsN Kotaagung	MTsN 1 Tanggamus
15	Lampung	MTsN Model Talangpadang	MTsN 2 Tanggamus
16	Lampung	MTsN Metro Batanghari	MTsN 1 Lampung Timur
17	Lampung	MTsN Raman Utara	MTsN 2 Lampung Timur
18	Lampung	MTsN Kasui	MTsN 1 Way Kanan
19	Lampung	MTsN Serupa Indah	MTsN 2 Way Kanan
20	Lampung	MTsN Kedondong	MTsN 1 Pesawaran
21	Lampung	MTsN Gunungrejo	MTsN 2 Pesawaran

22. Lampung ...

8

22	Lampung	MTsN Pringsewu	MTsN 1 Pringsewu
23	Lampung	MTsN Sukoharjo	MTsN 2 Pringsewu
24	Lampung	MTsN Seri Tanjung Mesuji	MTsN 1 Mesuji

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 365 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 49 (EMPAT PULUH SEMBILAN)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Lampung	MIN 1 Tanjung Karang	MIN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MIN 1 Teluk Betung	MIN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MIN Tanjung Agung	MIN 3 Bandar Lampung
4	Lampung	MIN Sawah Brebes	MIN 4 Bandar Lampung
5	Lampung	MIN Sukarame	MIN 5 Bandar Lampung
6	Lampung	MIN Way Halim	MIN 6 Bandar Lampung
7	Lampung	MIN Jagabaya II	MIN 7 Bandar Lampung
8	Lampung	MIN Panjang	MIN 8 Bandar Lampung
9	Lampung	MIN Sukajawa	MIN 9 Bandar Lampung
10	Lampung	MIN Kota Baru	MIN 10 Bandar Lampung
11	Lampung	MIN Sinar Semendo	MIN 11 Bandar Lampung
12	Lampung	MIN Garuntang	MIN 12 Bandar Lampung
13	Lampung	MIN Model Kalianda	MIN 1 Lampung Selatan
14	Lampung	MIN Sukanegara Tanjung Bintang	MIN 2 Lampung Selatan
15	Lampung	MIN Srimulyo Natar	MIN 3 Lampung Selatan
16	Lampung	MIN Sidomulyo	MIN 4 Lampung Selatan
17	Lampung	MIN Rajabasa	MIN 5 Lampung Selatan
18	Lampung	MIN Uhum Sukamaju	MIN 6 Lampung Selatan

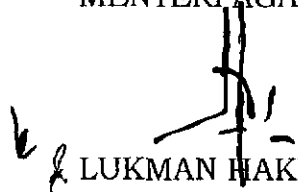
19. Lampung ...

4

19	Lampung	MIN 1 Kotabumi	MIN 1 Lampung Utara
20	Lampung	MIN 2 Kotabumi	MIN 2 Lampung Utara
21	Lampung	MIN 3 Kotabumi	MIN 3 Lampung Utara
22	Lampung	MIN 4 Kotabumi	MIN 4 Lampung Utara
23	Lampung	MIN Blambangan Pagar	MIN 5 Lampung Utara
24	Lampung	MIN Padang Ratu	MIN 6 Lampung Utara
25	Lampung	MIN Bernah	MIN 7 Lampung Utara
26	Lampung	MIN 1 Kriu	MIN 1 Pesisir Barat
27	Lampung	MIN 2 Tanjung Raya	MIN 1 Lampung Barat
28	Lampung	MIN 3 Watas	MIN 2 Lampung Barat
29	Lampung	MIN Hujung	MIN 3 Lampung Barat
30	Lampung	MIN Menggala	MIN 1 Tulang Bawang
31	Lampung	MIN Pasar Batang	MIN 2 Tulang Bawang
32	Lampung	MIN Kotaagung	MIN 1 Tanggamus
33	Lampung	MIN Purwodadi	MIN 2 Tanggamus
34	Lampung	MIN Adirejo	MIN 1 Lampung Timur
35	Lampung	MIN Sukadana	MIN 2 Lampung Timur
36	Lampung	MIN Gunung Terang	MIN 3 Lampung Timur
37	Lampung	MIN Braja Sakti	MIN 4 Lampung Timur
38	Lampung	MIN Blambangan Umpu	MIN 1 Way Kanan
39	Lampung	MIN Simpang Asam	MIN 2 Way Kanan
40	Lampung	MIN Tegal Mukti	MIN 3 Way Kanan
41	Lampung	MIN Sritunggal	MIN 4 Way Kanan
42	Lampung	MIN Model Pasar Baru	MIN 1 Pesawaran
43	Lampung	MIN Negara Saka	MIN 2 Pesawaran
44	Lampung	MIN Pringsewu	MIN 1 Pringsewu
45	Lampung	MIN Model Bandungbaru	MIN 2 Pringsewu
46	Lampung	MIN Gumukmas	MIN 3 Pringsewu

47	Lampung	MIN Pamenang	MIN 4 Pringsewu
48	Lampung	MIN Brebes	MIN 1 Tulang Bawang Barat
49	Lampung	MIN Mukti Karya	MIN 1 Mesuji

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN